

**INVESTIGASI DALAM KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA:
TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB DAN KAITANNYA DENGAN
MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE***

Wulan Dwi Utami
(Alumni Jurusan Akuntansi FE UNS)
Djoko Suhardjanto
(Dosen Akuntansi FE UNS)
Sri Hartoko
(Dosen Akuntansi FE UNS)

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of compliance with mandatory disclosure in the convergence of International Financial Reporting Standards (IFRS) by manufacturing companies and to determine the effect of corporate governance mechanisms that identified as managerial ownership, institutional ownership, number of board meetings, the number of audit committee meetings and the proportion of independent commissioners on the level of mandatory disclosure compliance. This study used leverage, profitability and auditor type as a control variable.

Measurement of IFRS mandatory disclosure compliance level in this study using Dichotomous method by using the items contained in the IFRS Presentation and Disclosure Checklist from Deloitte. Samples used amounted to 94 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2010. Samples were selected using purposive sampling techniques.

The average level of IFRS mandatory disclosure is 72,203%. The results of statistical analysis showed that the level of compliance of manufacturing companies in Indonesia in disclosing information related to those items required by IFRS was still low considering it was mandatory disclosure by Keputusan Ketua Bapepam-LK. X.K.6 KEP-134/BL/2006. In accordance with the objectives of this study, the test results of multiple regression showed that corporate governance mechanism affects the level of compliance with IFRS mandatory disclosure. Independent variables (corporate governance mechanism) that affect the level of compliance with IFRS mandatory disclosure are managerial ownership and institutional ownership. Other variables namely the number of board meetings, number of audit committee meetings, proportion of independent commissioners, leverage, profitability and auditor type do not affect the level of compliance with IFRS mandatory disclosure.

Keywords: corporate governance mechanism, compliance level, IFRS mandatory disclosure, manufacturing companies

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta untuk mengetahui pengaruh

mekanisme *corporate governance* yang diproksikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib tersebut.

Beberapa tahun terakhir, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia. *Forum for Corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2006) mempublikasikan sebuah survei yang dilakukan oleh *PricewaterhouseCoopers* pada tahun 1999 terhadap investor internasional di Asia, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada pada salah satu yang terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi.

Adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang, terutama pada laporan laba rugi, misalnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul, 2002).

Manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*. Lins dan Warnock (2004) menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme untuk menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan *corporate governance*, yaitu mekanisme internal perusahaan dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal diproksikan dengan kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, dan proporsi komisaris independen, sedangkan mekanisme eksternal diproksikan dengan kepemilikan institusional.

Penelitian yang dilakukan oleh Clemente dan Labat (2005) menyebutkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan. Semakin besar proporsi komisaris independen maka tingkat pengawasan manajerial akan semakin efektif sehingga perusahaan

lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela (Eng dan Mak, 2003). Sesuai dengan *Corporate Governance Guidelines* (2007), dewan komisaris harus memiliki jadwal pertemuan tetap dan dapat dilakukan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Ettredge et al. (2010), dewan komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib.

Komite audit merupakan bagian integral dari *corporate governance* yang dibebani dengan tanggung jawab pelaporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal (Owolabi dan Dada, 2011). Penelitian yang dilakukan Ettredge et al. (2010) serta Kent dan Stewart (2008), jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Salah satu mekanisme *corporate governance* yang merupakan perwujudan dari prinsip transparansi adalah kepemilikan manajerial. Penelitian Clemente dan Labat (2005) serta Nasir dan Abdullah (2004) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Menurut Shleifer dan Vishny (1996), investor institusional memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Akhtaruddin et al. (2009) pada perusahaan *nonfinancial* di Malaysia menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Pemerintah Indonesia sebagai anggota *The Group of Twenty* (G20 Forum) telah bersepakat untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS. IAI mencanangkan bahwa standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan (www.iaiglobal.or.id, 2010). Adopsi secara bertahap terhadap IFRS telah dilakukan oleh IAI dengan melakukan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disesuaikan dengan IFRS sehingga perusahaan *go public* wajib

mengungkapkan informasinya berdasarkan prinsip akuntansi baru atau revisi yang mulai efektif secara bertahap sejak tahun 2008.

Penelitian tingkat kepatuhan pengungkapan IAS/IFRS dimulai sekitar tahun 2000 dan menunjukkan banyak ketidaksesuaian dengan persyaratan IAS di berbagai bidang. Sejjakaa (2003) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa rerata skor tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS sebesar 40,502% pada sektor *financial* di Uganda. Di Mesir rerata level pengungkapan wajib terbilang rendah, yaitu 55,000% pada seluruh sektor (Dahawy, 2009). Sudarmadji dan Sularto (2007) meneliti tingkat kepatuhan pengungkapan sukarela perusahaan manufaktur di Indonesia dan menemukan bahwa rerata tingkat kepatuhan masih rendah, yaitu sebesar 37,000%. Dari penelitian terdahulu tersebut, semua menguji tingkat kepatuhan pengungkapan dan dikaitkan dengan karakteristik perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada dua hal. Pertama, fokus pada perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur cenderung memberikan pengungkapan yang lebih kepada *stakeholder* (Cooke, 1992; Meek et al., 1995). Selain itu, perusahaan manufaktur memiliki basis investor yang lebih luas (Renders dan Gaeremynck, 2005) karena dalam kegiatannya mengandalkan modal dari investor. Kedua, fokus pada laporan laba rugi karena menurut *Statement of Financial Accounting Concepts No.2*, laporan laba rugi menyediakan informasi laba yang merupakan perhatian utama dari pihak-pihak eksternal dalam melakukan penilaian kinerja dan pertanggungjawaban manajemen/perusahaan (FASB, 1980). Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* dan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS belum pernah dilakukan di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi motivasi bahwa penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS belum dilakukan di Indonesia. Padahal, penelitian tersebut sudah mulai dilakukan di luar negeri, antara lain oleh Sejjakaa (2003), Fekete et al. (2009), Dahawy (2009), Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010), serta Al-Akra et al. (2010). Selain itu, penelitian

ini juga untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi IFRS.

II. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009), ada dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*required/regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Suwardjono, 2005). Peraturan mengenai pengungkapan wajib di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. X.K.6 KEP-134/BL/2006 Tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik.

Konvergensi dapat berarti harmonisasi atau standardisasi, namun harmonisasi dalam konteks akuntansi dipandang sebagai suatu proses meningkatkan kesesuaian praktik akuntansi dengan menetapkan batasan tingkat keberagaman (Baskerville, 2010). Jika dikaitkan dengan IFRS, maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan standar akuntansi keuangan (SAK) terhadap IFRS. Zare et al. (2012) menyebutkan bahwa persiapan standar akuntansi yang lebih baik akan meningkatkan pengungkapan informasi pada laporan keuangan.

Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota *The Group of Twenty* (G20 Forum) di Washington DC, 15 November 2008. PSAK yang sudah dikonvergensi dengan IFRS dan berlaku efektif 2008-2010 antara lain:

Insert Tabel 1

2. Mekanisme *Corporate Governance*

Denisdan McConnell (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat mekanisme baik institusional maupun *market based* yang mendorong pengendali kepentingan perusahaan untuk membuat keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan kepada pemilik (pemasok modal). Herwidayatmo (2000) mengatakan bahwa elemen dari *corporate governance* meliputi struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Menurut Ashurov (2010), efektivitas *corporate governance* ditentukan oleh bagaimana mekanisme *corporate governance* tersebut bekerja dalam perusahaan. Sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* tetapi jika mekanisme/prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai (Herwidayatmo, 2000). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada mekanisme *corporate governance*.

Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat dua potensial *agency problem* yang berkaitan dengan kepemilikan. Pertama, *agency problem* antara manajemen dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Kedua, *agency problem* antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Shleifer dan Vishny, 1996). Solusi untuk masalah *agency problem* tersebut cenderung berasal dari dua kategori, yaitu melalui insentif dan monitoring (Zhou dan Panbunyuen, 2008). Insentif tersebut antara lain dengan memberi kepemilikan saham kepada manajer (Jensen dan Meckling, 1976) dan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional (Alves dan Ferreira, 2008). Mekanisme lain yang dilakukan dewan komisaris dan komite audit adalah dengan melakukan rapat/pertemuan tetap serta adanya komisaris independen.

3. Pengembangan Hipotesis

1. Kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

Kepemilikan oleh manajemen dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Clemente dan Labat (2005) di Spanyol serta Nasir dan Abdullah (2004) di Malaysia menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan sukarela. Menurut Al-Fayoumi et al. (2010), manajer yang memiliki saham perusahaan mempunyai insentif lebih besar untuk memaksimalkan kinerjanya, diantaranya kepatuhan terhadap pengungkapan wajib yang disyaratkan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

2. Kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 2005). Penelitian yang dilakukan Rouf dan Al-Harun (2011) serta Barako (2007) menemukan pengaruh positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan institusional yang besarakan membuat tingkat pengungkapan wajib juga semakin banyak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

3. Jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

Menurut *Corporate Governance Guidelines* (2007), dewan komisaris harus memiliki jadwal pertemuan tetap dan dapat dilakukan pertemuan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Suhardjanto dan Dewi (2011) serta Ettredge et al. (2010) menemukan bahwa dewan

komisaris yang lebih sering mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₃: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

4. Jumlah rapat komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

Menurut Herwidayatmo (2000), anggota komite audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan agar tugas dan fungsinya dapat berjalan secara efektif. Ettredge et al. (2010) serta Allegrini dan Greco (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan. Semakin sering diadakan rapat komite audit diharapkan meningkatkan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₄: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

5. Proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

Proporsi komisaris independen dapat memastikan transparansi, struktur yang sehat, dan pengambilan keputusan yang rasional (Apostolou dan Nanopoulos, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin et al. (2009), Huafang dan Jianguo (2007) serta Apostolou dan Nanopoulos (2009) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Semakin besar proporsi komisaris independen diharapkan pengungkapan wajib IFRS semakin tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₅: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS

Selain menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini juga menyertakan *leverage*, profitabilitas dan tipe auditor sebagai variabel kontrol.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis (*hypotesis testing*) yaitu penelitian yang menguji apakah hubungan yang diperkirakan memang terbukti dan jawaban atas pertanyaan penelitian telah diperoleh (Sekaran dan Bougie, 2010).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listing* (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dan 2010. Tahun 2009 dan 2010 dipilih karena Indonesia sudah melakukan konvergensi IFRS secara bertahap yang mulai efektif sejak tahun 2009. Jumlah populasi tahun 2009 dan 2010 masing-masing berjumlah 142 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur tersebut terdaftar di BEI tahun 2009 dan 2010, tercantum dalam *Fact Book* 2010 dan 2011, serta menerbitkan *annual report* tahun 2009 dan 2010 yang dapat memberikan informasi lengkap sesuai dengan variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel yang sesuai sebanyak 188 (dua tahun).

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh situs www.idx.co.id dan dari situs masing-masing perusahaan sampel.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

a. Kepemilikan Manajerial

Menurut El-Gazzar et al. (2006), kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Huafang dan Jianguo, 2007).

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemegang saham luar yang merupakan institusi, perusahaan, lembaga asuransi, bank, dana pensiun (Eng dan Mak, 2003; Pangaribuan, 2007). Sesuai dengan Barako (2007) serta Rouf dan Al-Harun (2011), kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.

c. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat dewan komisaris merupakan rapat yang dilakukan dewan komisaris dalam suatu perusahaan selama satu tahun (*Corporate Governance Guidelines*, 2007). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Ettredge et al. (2010) serta Allegrini dan Greco (2011) yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu tahun.

d. Jumlah Rapat Komite Audit

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (FCGI, 2001). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Kent dan Stewart (2008) serta Allegrini dan Greco (2011), yaitu jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun.

e. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Penelitian ini menggunakan indikator sesuai dengan penelitian Suhardjanto dan Dewi (2011) serta Huafang dan Jianguo (2007) yaitu menggunakan proporsi anggota dewan

komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Variabel Dependen (Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yang diproksikan oleh 4 IAS pada tahun 2009 dan 5 IAS pada tahun 2010. Item pada IAS tersebut diidentifikasi berdasarkan *IFRS Presentation and Disclosure Checklist* dari Deloitte. *Checklist* tersebut telah digunakan pada penelitian terdahulu, misalnya Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010) yang menggunakan *checklist* dari Deloitte untuk dikembangkan dan diterapkan dalam mengukur tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Insert Tabel 2

Desain variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan metode *Dichotomous* atau biasa disebut *Unweighted* yang juga digunakan oleh penelitian terdahulu, antara lain Tsavoulatas et al. (2008), Dahawy (2009) serta Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010). Pengukuran tingkat kepatuhan dengan cara memberi skor 1 untuk item yang diungkapkan; skor 0 pada item yang tidak diungkapkan; dan NA (*Not Applicable*) pada item yang tidak dapat diterapkan pada perusahaan tersebut (Al-Mutawaa dan Hewaidy, 2010).

$$\text{MANDISC}_{BY} = \frac{\sum \text{DISC}_{BY}}{\sum \text{MAX}_{BY}} \times 100\%$$

Dimana: MANDISC_{BY} =Skor kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan manufaktur B pada tahun Y

DISC_{BY} =Jumlah item yang diungkapkan perusahaan manufaktur B pada tahun Y

MAX_{BY} =Nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan manufaktur B pada tahun Y

Variabel Kontrol

a. *Leverage*

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Haniffa dan Cooke (2005) serta Suhardjanto dan Miranti (2009) yaitu menggunakan rasio utang terhadap modal sendiri.

b. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu (Nurkhin, 2009). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Haniffa dan Cooke (2005), Barako (2007), serta Nurkhin (2009) yang dihitung dengan membandingkan pendapatan setelah pajak dengan total ekuitas.

c. Tipe Auditor

Big 4 didefinisikan sebagai indikator kualitas auditor, yaitu skor 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh *Big 4* dan skor 0 untuk perusahaan yang tidak diaudit oleh *Big 4* (Al-Mutawaa dan Hewaidy, 2010).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *release* 16. Sebagai persyaratan pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Gujarati, 2010). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$\text{MANDISC} = b_0 + b_1\text{KEPMAN} + b_2\text{KEPINS} + b_3\text{RPTDWN} + b_4\text{RPTAUD} + b_5\text{KOMIND} + b_6\text{LEV} + b_7\text{PROF} + b_8\text{AUDT} + e$$

Notasi:

MANDISC	:	<i>Mandatory Disclosure IFRS</i>
KEPMAN	:	Kepemilikan Manajerial
KEPINS	:	Kepemilikan Institusional
RPTDWN	:	Jumlah Rapat Dewan Komisaris
RPTAUD	:	Jumlah Rapat Komite Audit
KOMIND	:	Proporsi Komisaris Independen
LEV	:	<i>Leverage</i>
PROF	:	Profitabilitas
AUDT	:	Tipe Auditor
b_0	:	Konstan
$b_1 - b_8$:	Koefisien regresi
E	:	<i>error</i>

IV. Hasil dan Pembahasan

Deskriptif Data

Insert Tabel 3

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rerata tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS adalah sebesar 72,203%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS pada perusahaan manufaktur di Indonesia belum sesuai dengan yang disyaratkan, mengingat pengungkapan wajib telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. X.K.6 KEP-134/BL/2006 Tanggal 07 Desember 2006 sehingga perusahaan wajib mengungkapkan 100,000%.

Penelitian tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS di negara maju telah dilakukan oleh Muller et al. (2008) di dua belas negara Eropa dan menghasilkan rerata tingkat kepatuhan sebesar 79,400% pada penerapan IAS 40. Penelitian juga telah dilakukan pada beberapa negara berkembang, antara lain Mesir dengan rerata sebesar 55,000% (Dahawy, 2009), Yordania 79,000% (Al-Akra et al., 2010), Kuwait 69,000% (Al-Mutawaa

dan Hewaidy, 2010), Uganda 40,502%(Sejjaaka, 2003), Ghana 60,989% (Mensah, 2011), dan Hongaria 62,000% (Fekete et al., 2009).

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa rerata pengungkapan wajib IFRS di Indonesia sudah lebih tinggi daripada negara-negara berkembang seperti Mesir, Kuwait, Uganda, Ghana dan Hongaria tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Yordania serta beberapa negara maju di Eropa. Nilai rerata sebesar 72,203% masih di bawah 100,000% sehingga belum sesuai dengan ketentuan pengungkapan wajib yang disyaratkan.

Tingkat pengungkapan paling rendah dilakukan oleh PT Intanwijaya Internasional, Tbk dengan tingkat pengungkapan sebesar 55,320% pada tahun 2009 dan PT Barito Pasific, Tbk dengan pengungkapan sebesar 46,150% pada tahun 2010. PT Intanwijaya Internasional, Tbk dan PT Barito Pasific, Tbk memiliki tingkat pengungkapan terendah karena banyak tidak mengungkapkan item yang disyaratkan, yaitu item yang terkait dengan persediaan, aset tetap, sewa dan properti investasi.

Insert Tabel 4

IAS 2 (*Inventory*) merupakan IAS dimana item *mandatory disclosure* paling banyak diungkapkan. Hal ini karena semua perusahaan manufaktur memiliki persediaan sehingga IAS 2 menempati posisi tertinggi. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib selanjutnya diikuti oleh IAS 16 dengan rerata 85,373% setiap tahunnya. IAS 23 yang baru efektif tahun 2010 diterapkan oleh 13 perusahaan dan menempati posisi ketiga dengan rerata 65,384%. Rerata IAS 40 hanya berkisar 58,210% setiap tahunnya. Dari 188 sampel yang diteliti hanya terdapat 38 perusahaan yang mempunyai/menerapkan IAS 40 tentang Properti Investasi. IAS 17 menempati posisi tingkat kepatuhan pengungkapan terendah dengan rerata 25,701%.

Insert Tabel 5

Statistik deskriptif variabel independen menghasilkan rerata kepemilikan manajerial sebesar 3,423%; rerata kepemilikan institusional 68,627%; rerata jumlah rapat dewan

komisaris sebanyak enam kali; rerata jumlah rapat komite audit sebanyak tujuh kali; rerata proporsi komisaris independen sebesar 0,394; rerata rasio *leverage* sebesar 1,331; rerata rasio profitabilitas sebesar 0,079; rerata tipe auditor sebesar 0,457.

Pengujian Hipotesis

Insert Tabel 6

Pengujian regresi berganda ini dilakukan dengan metode *backward*¹. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,043 dan *Adjusted R Square* (*Adjusted R²*) sebesar 0,033. Berdasarkan nilai *Adjusted R²* tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 3,300% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol, sedangkan sisanya sebanyak 96,700% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Nilai F hitung sebesar 4,157 dengan probabilitas 0,017 (*p-value* < 0,050). Karena nilai F lebih besar dari 4,000 dan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,050 maka model regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik (*good overall model fit*) sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan pengungkapan wajib atau dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, *leverage*, profitabilitas dan tipe auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS (Ghozali, 2009).

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS, sedangkan jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat

¹ Metode *backward* adalah salah satu metode pengolahan data dengan cara memasukkan semua variabel independen secara keseluruhan dan secara otomatis SPSS akan menghilangkan satu persatu variabel independen yang dianggap kurang signifikan dalam memprediksi model persamaan regresi yang paling signifikan (Mauliano, 2009)

komite audit, proporsi komisaris independen, *leverage*, profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Kepemilikan manajerial (KEPMAN) memiliki *p-value* sebesar 0,009 pada tingkat signifikansi 0,050 dan koefisien positif sebesar 0,157 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hasil uji regresi ini sesuai dengan hipotesis sehingga hipotesis pertama diterima. Manajer memiliki insentif yang lemah untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sehingga diperlukan kepemilikan manajerial untuk memotivasi manajer agar dapat memaksimalkan kinerjanya (Al-Fayoumi et al., 2010), diantaranya ketaatan terhadap pengungkapan wajib yang disyaratkan oleh standar. Menurut Beasley (1996), komisaris yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan monitoring sehingga akan mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan manajerial maka pengungkapan wajib IFRS akan semakin tinggi.

Kepemilikan institusional (KEPINS) memiliki *p-value* sebesar 0,028 pada tingkat signifikansi 0,050 dan memiliki koefisien positif sebesar 0,062. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis sehingga hipotesis kedua diterima. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Eng dan Mak, 2003). Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal tersebut karena adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standar.

Jumlah rapat dewan komisaris memiliki *p-value* 0,766, jauh di atas 0,050. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS sehingga hipotesis ketiga ditolak. Berapapun

jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini terjadi karena seringkali terdapat seorang atau lebih komisaris yang mendominasi jalannya rapat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan, padahal proses rapat sangat penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris (Muntoro, 2006).

Jumlah rapat komite audit memiliki *p-value* sebesar 0,557, lebih besar dari 0,050 dan koefisien sebesar -0,043. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Penjelasan yang mungkin adalah jumlah rapat komite audit dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada, terdapat kemungkinan bahwa rapat/pertemuan komite audit jarang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pihak manajemen maupun auditor eksternal sehingga masalah-masalah yang terdapat dalam proses pelaporan keuangan tidak terungkap dan tidak diketahui oleh komite audit (Pamudji dan Trihartati, 2010).

Proporsi komisaris independen (KOMIND) memiliki *p-value* sebesar 0,998, jauh di atas 0,050. Nilai ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini bertentangan dengan hipotesis kelima sehingga hipotesis kelima ditolak. Ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30,000% belum cukup tinggi untuk membuat komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris (Sutedi, 2011). Jika komisaris independen merupakan pihak mayoritas (>50,000%) mungkin dapat lebih efektif dalam memonitor perusahaan (Siregar dan Utama, 2006).

Leverage sebagai variabel kontrol memiliki *p-value* 0,512 sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Perusahaan dengan *leverage* tinggi akan mengurangi pengungkapan untuk menghindari sorotan dari *debtholder* (Suhardjanto dan Wardhani, 2010). Tingkat *leverage* yang rendah juga tidak mendorong pengungkapan wajib yang lebih tinggi. Hal ini karena kreditor

(institusi keuangan-bank) tidak mengandalkan laporan keuangan, tetapi lebih sering mengakses informasi secara langsung (Al-Mutawaa dan Hewaidy, 2010).

Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan menggunakan *Return on Equity* (ROE). Profitabilitas memiliki *p-value* 0,340 yang berarti profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Kasus skandal laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk menjadi salah satu contoh keengganan perusahaan untuk mengungkapkan berapa besar laba sesungguhnya yang diperoleh perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Al-Mutawaa dan Hewaidy (2010) serta Hossain dan Hammami (2009) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak signifikan dalam mempengaruhi pengungkapan.

Tipe auditor sebagai variabel kontrol terakhir memiliki *p-value* 0,149, jauh di atas 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa tipe auditor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Alasan yang dapat menjelaskan fenomena ini berkaitan dengan subjektivitas auditor karena kualitas laporan keuangan auditan secara tidak langsung dipengaruhi oleh integritas auditor secara individual (Pamudji dan Trihartati, 2010). Tingkat pengungkapan wajib IFRS yang rendah tidak akan terdeteksi jika auditor secara individual memiliki integritas rendah sekalipun auditor tersebut berasal dari KAP *Big 4*.

V. Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengungkapan wajib IFRS sebesar 72,203%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS di Indonesia masih kurang, mengingat perusahaan harus mengungkapkan 100,000% untuk pengungkapan wajib.

2. IAS 2/PSAK 14 (Persediaan) adalah yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan manufaktur dengan rerata 89,893%, diikuti oleh IAS 16/PSAK 16 (Aset Tetap) dengan rerata 85,373%, IAS 23/PSAK 26 (Biaya Pinjaman) dengan rerata 65,384%, IAS 40/PSAK 13 (Properti Investasi) dengan rerata 58,210% dan IAS 17/PSAK 30 (Sewa) dengan rerata 25,701%.
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sehingga hipotesis pertama dan kedua diterima. Variabel lainnya yaitu jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, *leverage*, profitabilitas dan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Keterbatasan

1. Dasar pengidentifikasian item pengungkapan wajib IFRS menggunakan *checklist* dari Deloitte yang masih bersifat umum dan belum spesifik sehingga harus mengidentifikasi terlebih dahulu item mana saja yang bersifat *mandatory* dan mana yang bersifat *voluntary*.
2. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk jenis industri atau perusahaan lain karena tiap perusahaan belum tentu mengungkapkan item yang sama karena kepatuhan tiap perusahaan akan berbeda-beda sesuai dengan item maksimal pada IAS yang dapat diterapkan.

VI. Daftar Pustaka

- Akhtaruddin, M., M.A.A. Hossain, M. Hossain dan L. Yao. 2009. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *Journal of Applied Management Accounting Research* 7 (1): 1-20.
- Al-Akra, M., I.A. Eddie dan M.J. Ali. 2010. The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review*(42): 170–186.
- Al-Fayoumi, N., B. Abuzayed, dan D. Alexander. 2010. Ownership Structure and Earnings Management in Emerging Markets: The Case of Jordan. *International Research Journal of Finance and Economics* (38): 28-47.
- Al-Mutawaa, A. dan A.M. Hewaidy. 2010. Disclosure Level and Compliance with IFRSs: An Empirical Investigation of Kuwaiti Companies. *The International Business and Economics Research Journal* 9 (5): 33.
- Allegrini, M. dan G. Greco. 2011. Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence From Italian Listed Companies. *Journal Management Government* 26: 208-229.
- Alves, P. dan M. Ferreira. 2008. Who Owns the Largest Firms Around the World?. *International Research Journal of Finance and Economics* (21): 93-111.
- Apostolou, A.K. dan K.A. Nanopoulos. 2009. Voluntary Accounting Disclosure and Corporate Governance: Evidence From Greek Listed Firms. *International Journal Accounting and Finance* 1 (4): 395-414.
- Ashurov, Z. 2010. The Corporate Governance Mechanism: How It Works in the Context of Uzbekistan. *The 2nd International Scientific and Practical Conference on Innovation Processes and Corporate Governance, Minsk, Belarus*. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1748444. 7 September 2011.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.2006. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik*. http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/index.htm. 5 Juni 2011.
- _____. 2010. *Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-554/BL/2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*. http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/index.htm. 13 September 2011.
- Barako, D.G. 2007. Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports. *African Journal of Business Management* 1(5): 113-128.

- Baskerville, R.F. 2010. *100 Questions (and Answers) About IFRS*. Working Paper Victoria University of Wellington: 1-50.
- Beasley, M.S. 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* 71 (4): 443-465.
- Boediono, G.S.B. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Clemente, A.G. dan B.N. Labat. 2005. Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure: The Role of Independent Directors in The Boards of Listed Spanish Firms. <http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento16048.pdf>. 9 Mei 2011.
- Cooke, T.E. 1992. The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations. *Accounting and Business Research* 22 (87): 229-237.
- Corporate Governance Guidelines. 2007. http://www.ecgi.org/codes/documents/cg_guidelines_en.pdf. 15 September 2011.
- Dahawy, K. 2009. Company Characteristics and Disclosure Level: The Case of Egypt. *International Research Journal of Finance and Economics* (34): 194-208.
- Denis, D.K. dan J.J. McConnell. 2003. International Corporate Governance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 38: 1-36.
- El-Gazzar, S.M., J.M. Fornaro dan R.A. Jacob. 2006. *An Examination of The Determinants and Contents of Corporate Voluntary Disclosure of Management's Responsibilities for Financial Reporting*. Lubin School of Business Working Paper.
- Eng, L.L. dan Y.T. Mak. 2003. Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy* 22: 325-345.
- Ettredge, M., K. Johnstone, M. Stone dan Q. Wang. 2010. The Effects of Company Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. *Review of Accounting Studies, Forthcoming*: 1-34.
- Fekete, S., D. Matis dan J. Lukacs. 2009. Factors Influencing The Extent of Corporate Compliance With IFRS: The Case of Hungarian Listed Companies. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica* 1 (10).
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information*.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. <http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/articles.html>. Diakses 6 Juli 2011.

- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2006. *How is the Indonesian Corporate Governance Condition in Reality?*. <http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/articles.html>. Diakses 10 Mei 2011.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N. 2010. *Basic Econometrics*. Eleventh Edition. New York: Mc. Graw-Hill.
- Haniffa, R.M. dan T.E. Cooke. 2005. The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy* (24): 391-430.
- Herwidayatmo.2000. Implementasi GCG untuk Perusahaan Publik di Indonesia. *Majalah Usahawan* Th XXIX (10): 25-32.
- Hossain, M. dan H. Hammami. 2009. Voluntary Disclosure in The Annual Reports of an Emerging Country: The Case of Qatar. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* (25): 255–265.
- Huafang, X. dan Y. Jianguo. 2007. Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence From Listed Companies in China. *Managerial Auditing Journal* 22 (6): 604-619.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* (3): 305-360.
- Kent, P. dan J. Stewart. 2008. *Corporate Governance and Disclosures on The Transition to International Financial Reporting Standards*. Bond University Business Papers. http://epublications.bond.edu.au/business_pubs/130. Diakses 7 Agustus 2011.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. http://www.cicfcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf. Diakses 24 Mei 2011.
- Lins, K.V. dan F.E. Warnock. 2004. Corporate Governance and the Shareholder Base. *International Finance Discussion Papers* (816).
- Mauliano, D.A. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia*. Artikel Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_10205276.pdf. Diakses 16 Januari 2012.
- Meek, G.K., C.B. Roberts dan S.J. Gray. 1995. Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by US, UK and Continental European Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies* 26: 555-572.
- Mensah, B.K.A. 2011. *The Impact Of Adopting International Accounting Standards 1 (IAS 1) in Ghana: The Extent Of Disclosures, and Their Relationship to Corporate Characteristics*. Swiss Management Center University Working Paper.

- Muller, K.A.III, E.J. Riedl dan T. Sellhorn. 2008. *Consequences of Voluntary and Mandatory Fair Value Accounting: Evidence Surrounding IFRS Adoption in the EU Real Estate Industry*. Harvard Business School Working Paper 09-033.
- Muntoro, R.K. 2006. *Membangun Dewan Komisaris Yang Efektif*. Artikel Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. http://www.lmfeui.com/data/mui_Membangun%20Dewan%20Komisaris%20%20yang%20Efektif_Ronny%20K%20Muntoro.pdf. Diakses 18 November 2011.
- Nasir, N.M. dan S.N. Abdullah. 2004. Voluntary Disclosure and Corporate Governance among Financially Distressed Firms in Malaysia. *Curtin Business School* 3 (1): 1-39.
- Nurkhin, Ahmad. 2009. *Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)*. Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Owolabi, S. A. dan S.O. Dada. 2011. Audit Committee: An Instrument of Effective Corporate Governance. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences* 35: 173-183.
- Pamudji, S. dan A. Trihartati. 2010. *Pengaruh Independensi dan Efektifitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*. Artikel Universitas Diponegoro Semarang. ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/176/105. Diakses 7 Maret 2012.
- Pangaribuan, F.I.H.M. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Struktur Modal dan Kinerja Perusahaan: Studi Empiris Pada Family Business Group yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 2 (1): 23-55.
- Renders, A. dan A. Gaeremynck. 2005. Legal and Voluntary Investor Protection and Early IFRS-adoption: A Study of European Companies. *De Economist* 1 (155): 49-72.
- Rouf, A. dan A. Al-Harun. 2011. Ownership Structure and Voluntary Disclosure in Annual Reports of Bangladesh. *Pakistan Journal of Commerce and Social Science* 5 (1), 129-139.
- Sejjaaka, S. 2003. Corporate Mandatory Disclosure by Financial Institutions in Uganda. *Journal of African Business* 6 (1-2): 1-34.
- Sekaran, U. dan R. Bougie. 2010. *Research Methods for Business*. Eight Edition. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Shleifer, A. dan R. Vishny. 1996. *A Survey of Corporate Governance*. National Bureau of Economic Research Working Paper 5554.
- Siregar, S.V. dan S. Utama. 2006. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 9 (3): 307-326.

- Sudarmadji, A.M. dan L. Sularto. 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT 2*.
- Suhardjanto, D. dan A. Dewi. 2011. Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan 15* (1): 105-118.
- Suhardjanto, D. dan M. Wardhani.2010. Praktik Intellectual Capital Disclosure Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 14* (1): 71–85.
- Suhardjanto, D. dan L. Miranti. 2009. Praktik Penerapan Indonesian Environmental Reporting Index dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 13* (1): 63-77.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekrayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Syaharul, Y. 2002. *Bapepam: Kasus Kimia Farma Merupakan Tindak Pidana*. <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2002/11/04/brk,20021104-36,id.html>. Diakses 19 September 2011.
- Tsalavoutas, I., L. Evans dan M. Smith. 2008. Compliance with IFRS Mandatory Disclosure Requirements: Exploring Methodological Issues. *Managerial Auditing Journal 25* (8): 814-842.
- Zare, I., J. Nekounam dan A. Talari. 2012. Review Effect Accounting Standards on Disclosure of Information (According to Accounting Standards of Iran). *Middle Eastern Finance and Economics* (16): 131-137.
- Zhou, M.M. dan P. Panbunyuen. 2008. *The Association Between Board Composition And Different Types Of Voluntary Disclosure: A Quantitative Study Of Chinese And Swedish Listed Companies*. UnpublishedThesis. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:142516/FULLTEXT01>. Diakses 27 Juni 2011.
- www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?id=290. 2010. *IASB Menjamin IFRS Bersifat Global dan Tidak Memihak*. Diakses 27 April 2011.

VII.Lampiran

Tabel 1
PSAK yang Sudah Konvergen dengan IAS/IFRS

No	PSAK	Ref	Issued	Effective Date
1	PSAK 13 Properti Investasi	IAS 40	2007	1-Jan-08
2	PSAK 16 Aset Tetap	IAS 16	2007	1-Jan-08
3	PSAK 30 Sewa	IAS 17	2007	1-Jan-08
4	PSAK 14 Persediaan	IAS 2	2008	1-Jan-09

5	PSAK 26 Biaya Pinjaman	IAS 23	2008	1-Jan-10
6	PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan	IAS 32	2006	1-Jan-10
7	PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	IAS 39	2006	1-Jan-10

Sumber: www.iaiglobal.or.id (2010)

Tabel 2
Jumlah Item Pengungkapan Wajib

No	PSAK	Ref	Issued	Effective Date	Checklist	Jumlah Item
1	PSAK 13 Properti Investasi	IAS 40	2007	1-Jan-08	2009	25 Item
2	PSAK 16 Aset Tetap	IAS 16	2007	1-Jan-08	2009	28 Item
3	PSAK 30 Sewa	IAS 17	2007	1-Jan-08	2009	21 Item
4	PSAK 14 Persediaan	IAS 2	2008	1-Jan-09	2009	4 Item
5	PSAK 26 Biaya Pinjaman	IAS 23	2008	1-Jan-10	2010	2 Item
Total						80 Item

Sumber: *Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist*

Tabel 3
Statistik Deskriptif *Mandatory Disclosure* Per Tahun

Tahun	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2009	55,320	93,750	72,032	8,626
2010	46,150	93,750	72,375	9,047
Total	46,150	93,750	72,203	8,817

Sumber: Data sendiri yang diolah

Tabel 4
Statistik Deskriptif *Mandatory Disclosure* Per IAS

IAS	N	Minimum	Maximum	Mean
IAS 2	188	50,000	100,000	89,893
IAS 16	188	75,000	96,430	85,373
IAS 17	145	9,090	75,000	25,701
IAS 40	38	24,000	76,000	58,210
IAS 23	13	50,000	100,000	65,384

Sumber: Data sendiri yang diolah

Tabel 5
Statistik Deskriptif Variabel Independen

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
KEPMAN (%)	188	0,000	70,000	3,423	9,370
KEPINS (%)	188	0,000	100,000	68,627	24,087
RPTDWN (kali/tahun)	188	1,000	42,000	6,319	7,029
RPTAUD (kali/tahun)	188	1,000	44,000	6,867	6,710
KOMIND	188	0,000	1,000	0,394	0,133
LEV	188	-10,340	38,790	1,331	3,488
PROF (ROE)	188	-3,240	3,240	0,079	0,447
AUDT	188	0,000	1,000	0,457	0,499
Valid N (list wise)	188				

Sumber: Data sendiri yang diolah

Tabel 6
Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien	t	p-value
(Constant)	67,302	31,476	0,000
KEPMAN	0,157	2,646	0,009*
KEPINS	0,062	2,210	0,028*
RPTDWN	0,022	0,298	0,766
RPTAUD	-0,043	-0,588	0,557
KOMIND	0,000	-0,002	0,998
<i>Leverage</i>	-0,047	-0,658	0,512
Profitabilitas	0,069	0,956	0,340
Tipe Auditor	-0,105	-1,450	0,149
<i>R Square</i>	0,043		
<i>Adjusted R Square</i>	0,033		
F	4,157		
Sig	0,017		

*Secara statistik signifikan pada tingkat 5%

CURRICULUM VITAE

A. Wulan Dwi Utami, S.E.

1. Nama lengkap Wulan Dwi Utami, S.E.
2. NIP -
3. Tempat & Tanggal Lahir Wonogiri, 27 Juni 1990
4. Program Studi/PT Akuntansi / Universitas Sebelas Maret
5. Alamat Surat Jl. Nakula III RT 02/02 Wonokarto Wonogiri
 - a Telpon/HP 085643878245
 - b E-mail wdwi_utami@ymail.com
 - c Telpon/Faks -
6. Status Akademik Alumni FE UNS
7. Jabatan Struktural -
8. Pendidikan Terakhir
 - a Gelar Sarjana
 - b Tahun Lulus 2012
 - c Program Studi Akuntansi
 - d Nama Perguruan Tinggi Universitas Sebelas Maret Surakarta
 - e Negara Indonesia

B. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons), Ph.D, Ak.

1. Nama lengkap Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com (Hons), Ph.D, Ak.
2. NIP 1963 0203 1989 03 1006
3. Tempat & Tanggal Lahir Grobogan, 3 Pebruari 1963
4. Program Studi/PT Akuntansi / Universitas Sebelas Maret
5. Alamat Surat Jl. Sibela Dalam III No.6, Mojosongo – Jebres, Surakarta 57127
 - a Telpon/HP +6282329265682
 - b E-mail suhardjanto04@yahoo.com
 - c Telpon/Faks 0271.852334 / 0271.852334
6. Status Akademik Dosen Pembimbing (di PDIE, Mahasiswa S3)
7. Jabatan Struktural Sekretaris Magister Manajemen
8. Pendidikan Terakhir

a	Gelar	Doctor of Philosophy (Ph.D)
b	Tahun Lulus	2008
c	Program Studi	Accounting
d	Nama Perguruan Tinggi	Curtin University of Technology
e	Negara	Australia

C. Drs. Sri Hartoko, MBA, Ak.

1.	Nama lengkap	Drs. Sri Hartoko, MBA, Ak.	
2.	NIP	19610711 198703 1002	
3.	Tempat & Tanggal Lahir	Sukoharjo, 11 Juli 1961	
4.	Program Studi/PT	Akuntansi / Universitas Sebelas Maret	
5.	Alamat Surat	Jl. Riung Lestari No. 129/IV C Riung Bandung	
	a	Telpon/HP	022 7565229, 08552116960
	b	E-mail	sri.hartoko@yahoo.com
	c	Telpon/Faks	-
6.	Status Akademik	Dosen Pembimbing (Mahasiswa S1)	
7.	Jabatan Struktural	-	
8.	Pendidikan Terakhir		
	a	Gelar	Magister
	b	Tahun Lulus	1994
	c	Program Studi	Akuntansi
	d	Nama Perguruan Tinggi	Western Michigan University
	e	Negara	Amerika Serikat